

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu yang menjadi program dalam pengembangan ekonomi lokal untuk masyarakat dari pemerintah adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR termasuk kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif (Aidil , 2014).

Program KUR ini muncul sebagai respon dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah beberapa dengan addendum ke IV pada tanggal 10 Januari 2012 Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Aditya Wardhana dan Zainuddin Iba| Analisis Kinerja Implementasi Program KUR ).

Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksud dari *feasible* dan *bankable* adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan meski belum masuk dalam kategori memenuhi persyaratan bank. Program ini diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM sudah menjadi bagian yang sangat *urgent* dari sistem perekonomian di Indonesia, hal ini disebabkan karena UMKM merupakan unit usaha yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usaha lain yang berskala besar serta memiliki keutamaan dalam menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, kelautan, dan perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank pelaksana. Dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP/USP koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank pelaksana.

Pemerintah menyalurkan KUR melalui sejumlah lembaga perbankan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk sebagai salah

Bank Pelaksana khususnya KUR Mikro. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang juga akan menjadi tempat penelitian yang peneliti pilih. Alasan peneliti menggunakan BRI sebagai tempat penelitian, yakni karena mayoritas penerima KUR yang ada di desa Bengkala kecamatan Kubutambahan berasal dari Bank BRI, tepatnya Bank BRI Unit Tamblang. Melalui wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada 3 informan, ditemukan bahwa semuanya adalah penerima KUR Bank BRI, pertama, Ibu Ketut Lentari dengan usaha dagang, kedua Ibu Made Warsih dengan usaha ternak, dan ketiga I Gede Sudia dengan usaha ternak. Dapat diketahui pula bahwa KUR yang disalurkan oleh BRI ini dapat menjangkau seluruh area di Indonesia, termasuk di daerah luar dan terasing seperti desa Bengkala yang merupakan salah satu desa yang kecil di kecamatan Kubutambahan.

Pencapaian realisasi KUR pada 2020 adalah sebesar Rp198,53 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya mencapai sekitar Rp140,1 triliun. Sejak Januari hingga September 2021, penyaluran KUR telah mencapai 63% dari target tahun ini yang nilainya sebesar Rp285 triliun. BRI sebagai bank yang fokus pada segmen UMKM, memimpin penyaluran KUR secara nasional dengan angka tertinggi. Hingga posisi September 2021, BRI mencatat realisasi penyaluran KUR mencapai Rp139,87 triliun kepada 4,8 juta nasabah. Angka realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyaluran KUR oleh BRI sepanjang 2020 lalu, yakni sebesar Rp138,54 triliun. Bank dengan jaringan terbesar dan tersebar di Indonesia ini selalu berupaya menjaga kualitas KUR yang disalurkan agar konsisten terjaga dengan baik. Per September 2021, BRI mencatat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*

(NPL) sekitar 1,16%. Sektor produksi mendominasi penyaluran KUR BRI dengan komposisi mencapai 58%.

Program KUR, membantu masyarakat dari segi akses permodalan serta dari segi pembiayaan. Sejak adanya KUR, banyak UMKM yang terbantu dalam hal permodalan. Ditambah lagi karena suku bunga dari program KUR masih bisa terjangkau oleh pemilik UMKM. Selain itu, persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit baginya juga tidak memberatkan. Namun, ditemukan juga bahwa program KUR banyak yang tidak tepat sasaran, dimana lebih banyak unit perdagangan yang menerima bantuan KUR, bukan dari unit produktif. Selain itu, KUR yang merupakan program bersubsidi, namun alokasinya lebih banyak diperuntukkan untuk usaha yang sudah mapan ketimbang usaha mikro.

Namun, sejak diturunkannya suku bunga kredit KUR menjadi 6 persen, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) justru menemukan mayoritas KUR yang terserap oleh unit perdagangan Akumindo menghitung 80 persen KUR terserap ke unit jasa perdagangan. Apabila KUR terus tersalurkan ke perdagangan, maka Akumindo pesimistis bakal ada dampak positif dari sektor UMKM ke perekonomian. Presiden pun diharapkan membuat aturan formal terkait alokasi KUR untuk sektor produksi (<https://www.liputan6.com/>). Presiden RI juga menyebutkan bahwa selama ini KUR lebih banyak disalurkan ke sektor-sektor perdagangan. Sementara, KUR untuk sektor pertanian baru termanfaatkan sekitar 30% dan untuk sektor industri pengolahan mikro, kecil, dan menengah baru sekitar 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya masih rendah (<https://katadata.co.id/>).

Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Penyaluran pola Kredit Usaha Rakyat ditujukan pada beberapa usaha seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit usaha rakyat ini ditujukan dalam membantu ekonomi usaha masyarakat kecil dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam diajukan permohonan peminjaman kredit tersebut, tentunya musti mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Kecil Mataram (Asperam) Yogyakarta, Budi Sarwono, mengatakan program itu mestinya disosialisasikan secara luas agar pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak pernah mengenal akses bank mampu memanfaatkan KUR.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat melalui Bank BRI dalam mengembangkan UMKM, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan UMKM di Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya.

1. Isu implementasi oleh masyarakat Desa Bengkala terhadap program KUR yang kurang tepat sasaran karena lebih banyak penerima KUR tersebut berasal dari sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor lainnya.
2. Banyaknya pelaku usaha di Desa Bengkala yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya dan ingin mengajukan pinjaman di Bank, namun usahanya masih belum *bankable*.
3. Adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala bagi para pelaku usaha di Desa Bengkala dalam mengajukan pinjaman ke Bank.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksud agar penelitian lebih terfokus pada topik yang memang menjadi pokok permasalahan. Masalah yang akan diteliti adalah implementasi program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan UMKM di Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan.

## 1.4. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan UMKM?
- 2) Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan UMKM?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan inti masalah yang di dapat pada rumusan masalah di atas ialah untuk.

- 1) Mengetahui implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan UMKM.
- 2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan UMKM.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan bisa memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi yang terkait dengan implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan UMKM.

- 2) Manfaat Praktis

Bagi pelaku UMKM bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan kredit usaha rakyat (KUR) dalam mengembangkan usaha.